

ANALISA KESELARASAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs) DENGAN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2016 – 2021

Afrida, Imron Basyari

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Indragiri Hulu

Email:

Received : 16 September 2018 ; Accepted : 10 Oktober 2018

Abstract

This SDGs Data Mapping exercise helps us to estimate readiness of Indragiri Hulu in applying proposed SDGs indicators to measure SDGs targets; for which indicator data improvement is required and where the data gaps exist. SDGs consist of 17 goals, 169 targets and 241 Indicators (220 Indicator for District). In order to be able to measure the achievements of the SDGs targets, set of indicators are required and data needs to be available to apply those indicators. The exercise was conducted through desk review method by mapping for each SDGs Target existing relevant indicators used or proposed in the local documents: Indragiri Hulu Medium- Term Development Plan 2016 - 2021 (RPJMD) and others relevant documents as required. The indicators mapping then followed by data mapping for each indicator based on the availability and quality of data from Statistics Agency (BPS) and line Agencies. The indicators mapping showed 13% Similar and 14% Proxy.

Keywords: SDGs, Mapping, goals, targets dan Indicators

1. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 Millenium Development Goals (MDGs) tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan (meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan) [1].

Kabupaten Indragiri Hulu tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pioneer dan role model Kabupaten lain pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan yang di dukung oleh United Nation Development Programme (UNDP). Untuk dapat mengukur pencapaian dari Target SDGs, diperlukan perangkat indikator dan ketersediaan data yang memungkinkan indikator tersebut untuk dapat dipergunakan. Tujuan dari pemetaan

ini adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kerangka hasil (result framework) yang terdiri dari sasaran dan indikator TPB/SDGs [4;5].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 Millenium Development Goals (MDGs) tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan (meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan) [1].

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, SDGs jauh lebih ambisius bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan "Tanpa Kemiskinan" dan

“Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan Tujuan tersebut hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “Zero Goal” [3]. Sebagai contoh, target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (zero). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (zero). TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator [1;3].

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

2.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs.

TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan

kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah “No One Left Behind” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah,

namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pemetaan terhadap kesesuaian antara TPB/SDGs dan Indikator pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan metode desk review, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data primer yang tertulis dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan ditopang dengan data-data sekunder berupa peraturan perundang – undangan tentang perencanaan daerah, Peraturan Daerah (Perda) , laporan data statistik Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau, laporan pemetaan di masing – masing instansi terkait, dokumen perencanaan, instansi di Kabupaten Indragiri Hulu, buku – buku dan jurnal yang relevan.

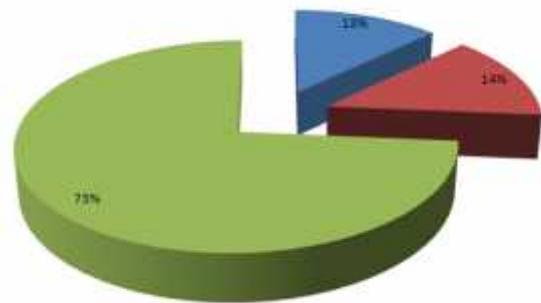
Dalam penelitian awal ini dokumen primer yang digunakan sebagai obyek studi adalah RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu 2013 – 2018 dan dokumen Rencana aksi nasional TPB/SDGs. Untuk memperkuat hasil pemetaan, maka dilakukan rapat pembahasan indikator dengan stakeholder

4. HASIL

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016- 2021 ini dilakukan dengan memperhatikan hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016- 2021, sebagaimana diatur pada pasal 282 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan telaah pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bahwa terdapat 28 Indikator Similar atau setara dengan 13%, 34 Indikator Proxy atau setara

dengan 14% dan 158 Indikator will be developed atau setara dengan 72%. analisa keselarasan terhadap Revisi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 28 Indikator Similar atau setara dengan 13%, 30 Indikator Proxy atau setara dengan 14% dan 162 Indikator will be developed atau setara dengan 73%.



Gambar 2. Keselarasan Indikator SDGs/TPB dengan Revisi RPJMD Indragiri Hulu

Indikator yang tergolong sebagai Indikator Selaras (Similar) antara lain terkait Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (Neonatal), Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs. Indikator yang tergolong sebagai Indikator Mendikati (Proxy) antara lain terkait Rasio Elektrifikasi dan Persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan indikator yang tidak sama dengan indikator global misalnya data terkait kepemilikan senjata api.

Indikator-indikator terkait keutanan, pertambangan, energi, pendidikan jenjang SLTA pada RPJMD 2016 – 2021 masih menjadi wewenang Kabupaten, Namun sejak 2017 wewenang tersebut berpindah menjadi wewenang provinsi sehingga pada Revisi RPJMD 2016 -2021 indikator terkait keutanan, pertambangan, energi, pendidikan jenjang SLTA di tiadakan.

Tabel 2 Indikator TPB/SDGs yang selaras dengan indikator pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola
17 Indikator Selaras	3 Indikator Selaras	6 Indikator Selaras	2 Indikator Selaras
13	9Indikator	4 Indikator	3

Indikator Proxy	Proxy	Proxy	Indikator Proxy
-----------------	-------	-------	-----------------

5. KESIMPULAN DAN SARAN

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil analisa keselarasan terhadap Revisi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 28 Indikator Similar atau setara dengan 13%, 30 Indikator Proxy atau setara dengan 14% dan 162 Indikator will be developed atau setara dengan 73%.

UCAPAN TERIMA KASIH

United Nation Development Programme (UNDP) serta Tanoto Foundation mendukung penuh implementasi SDGs di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 - 2019.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bappenas RI, Rencana Aksi Nasional SDGs Republik Indonesia 2016 – 2019 . [Dokumen Negara], 2016

[2] UNDP dan UNEP, Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets. Case of Indonesia [Report], 2015

[3] Ishatono dan S.T. Raharjo, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Penanggulangan Kemiskinan. SHARE Social Work Journal, Vol. 6, No. 2, 2016

[4] R.Z. Surya. Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Selodang Mayang, Vol 4 , No. 1, 2018

[5] R.Z. Surya. Erwi, T. Rachmawati, Pemetaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) yang berpotensi menjadi indikator RPJMD Pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 2019 - 2023. Jurnal Selodang Mayang, Vol 4, No. 2, 2018

LAMPIRAN INDIKATOR SELARAS

Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu	Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu
GOAL 1- Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun			DBD - (Per 100.000 Penduduk)
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Kemiskinan (%)		Cakupan Penanganan DBD - (%)
1.4.1 (g) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yg Memiliki Kompetensi Kebidanan - (%)
1.4.1 (h) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	3.8.1 Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung).	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin - (%) Cakupan Kunjungan Bayi - (%) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani - (%)
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial - (%)	3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Cakupan Desa Siaga Aktif
1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persentase Penyandang Cacat Penerima Jaminan Sosial - (%)		Rasio Dokter Persatuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Lingkungan Pemukiman Kumuh - (%) Kawasan Kumuh - (Hektar)		Rasio Dokter Umum Persatuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
GOAL 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			Rasio Dokter Gigi Persatuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga - (%) Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Rasio Dokter Spesialis Persatuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
GOAL 3- Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			Rasio Perawat Persatuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Kasus)		Rasio Bidan Persatuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (Kasus)		Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka Kejadian Malaria - (Per 1.000 Penduduk)		Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk - (Per 1.000 Penduduk)
	Angka Kesakitan	GOAL 4-Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia	
		4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun (%)

Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu	Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu
4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Sekolah 13 – 15 tahun (%)		PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2010 - (Rp/Juta)
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Rasio Anak Yang mengikuti PAUD (%)		Laju Pertumbuhan Ekonomi/ %
4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun.	Angka melek huruf (%)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)/ %
Goal 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua			Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Batu Bara)/ %
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Jumlah Air Bersih yang Disalurkan PDAM - (m ³) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih - (%)	Goal 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Rumah Tangga Bersanitasi Baik - (%)	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase Penanganan Sampah (%)
6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM (%)		Rasio TPS Per Satuan Penduduk - (m/1.000 Penduduk)
6.6.1.(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Status Pencemaran Mutu Air - (%)	11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Ratio Ruang Terbuka Hijau Persatuan wilayah ber HPL/HGB
Goal 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua		GOAL 16: Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	
7.1.1 Proporsi penduduk dengan akses terhadap listrik	Rumah Tangga Pengguna Listrik - (%)	16.6.1.(a) Peningkatan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK
Goals 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Kepemilikan Akte Kelahiran (%)
8.B.1.(a) Jumlah peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Pelayanan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh - (%)		
8.1.1. Laju pertumbuhan PDB perkapita	Pertumbuhan PDRB ADHK-TM Tahun 2010 - (%)		

LAMPIRAN INDIKATOR PROXY

Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu	Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu
GOAL 1- Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun		3.7.2 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
1.4.1 (j) Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	GOAL 4-Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia	
1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Luas Wilayah Kebanjiran (Hektar)	4.c.1 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi - %
	Cakupan pencegahan dan penanganan terhadap bencana (%)	GOAL 5-Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	
	Cakupan Kejadian Bencana yang Tertangani (%)	5.6.1 Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkaithubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Rasio Akseptor KB (Jumlah Apektor KB/Jumlah PUS)
GOAL 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	Prevalensi Peserta KB Aktif - (%)
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan - (%)	5.2.1 (a) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah - (%)
2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Balita Gizi Buruk - (%)		Indeks Pembangunan Gender
	2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan - (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
2.3.2 Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat		Balita Gizi Buruk - (%)	Rasio KDRT - (Jumlah KDRT/Penduduk)
	GOAL 3- Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Rasio produksi terhadap kebutuhan beras (%)	Goal 8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua
Nilai Tukar Petani (%)		8.3.1. (a) Persentase tenaga kerja formal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)			
3.2.2. (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB - (%)	8.3.1. (c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Pencari Tenaga Kerja Yang Ditempatkan - (%)
	Rasio Posyandu Per Satuan Balita - (Per 1.000 Balita)		Rasio Penduduk Yang Bekerja - (%)
3.3.2 Kejadian TB per 1000 orang	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC-BTA - (%)	8.9.1. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Usaha Kecil dan Mikro Yang Mendapat Pembinaan - (%)
			Persentase Koperasi Aktif - (%)
			Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB - (%)

Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu
	Jumlah Hotel dan Penginapan - (Unit)
8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	kunjungan wisatawan (orang)
Goal 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap - (%)
9.1.2. Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	Rasio Jumlah Angkutan Darat Thd Jumlah Penumpang - (Rasio)
9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Tersedianya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan – Dermaga
9.2.1.* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan - (%)
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
Goal 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	
11.1.1.(a) Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Rumah Layak Huni - (%)
11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang dilestarikan - (%)

Indikator SDGs	Indikator Kinerja RPJMD Inhu
Goal 15: Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	
15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Meningkat pengendalian terhadap kerusakan hutan dan lahan serta PETI - (orang)
15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup ampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi..	Penegakan Hukum Lingkungan - (%)
GOAL 16: Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Nilai akuntabilitas
16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Tersedianya Informasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (%)
Goal 17. Memperkuat cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	
17.3.1. Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari Total Anggaran domestik.	Realisasi investasi PMA (USD)

Lampiran Proporsi Indikator

No.	Pilar	Goal	Indikator	Proporsi Perindikator					
				Matched	%	Proxy	%	Will be Developed	%
A	Sosial	1. Tanpa Kemiskinan	24	6	25%	2	8%	16	67%
		2. Tanpa Kelaparan	11	1	9%	4	36%	6	55%
		3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	6	18%	3	9%	25	74%
		4. Pendidikan Berkualitas	13	4	31%	1	8%	8	62%
		5. Kesetaraan Gender	14	0	0%	3	21%	11	79%
	Sub Total		96	17		13		66	
B	Ekonomi	7. Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	50%	0	0%	1	50%
		8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	2	11%	4	21%	13	68%
		9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	13	0	0%	4	31%	9	69%
		10. Berkurangnya Kesenjangan	11	0	0%	0	0%	11	100%
		17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	0	0%	1	6%	15	94%
	Sub Total		61	3		9		49	
C	Lingkungan	6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	4	22%	1	6%	13	72%
		11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	13	2	15%	2	15%	9	69%
		12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	5	0	0%	2	40%	3	60%
		13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0%	0	0%	2	100%
		14. Ekosistem Lautan	0	0	0%	0	0%	0	0%
		15. Ekosistem Daratan	4	0	0%	2	50%	2	50%
Sub Total		42	6		7		29		
D	Hukum dan Tata Kelola	16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	21	2	10%	3	14%	16	76%
	Sub Total		21	2		3		16	